

**ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI PERBANDINGAN
PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Robert Nando

NPM : 1421020218

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Program Studi : Siyasah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H/2018 M

ABSTRAK

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Di Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu dengan mayoritas masyarakat Islam di Indonesia apakah demokrasi tersebut dapat di terima di negara Indonesia melalui pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia dan persamaan dan perbedaan pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan studi pustaka, mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka penelitian ini pengumpulan data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan Islam dan demokrasi baik itu bahan primer maupun bahan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid mengenai Islam dan demokrasi di Indonesia yaitu bagi keduanya persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi.

Persamaan dan perbedaan pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, persamaannya yaitu karakteristik pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari'ah. Hanya saja Gus Dur lebih suka menjadikan syari'ah sebagai social ethics dan berfungsi komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syari'ah sebagai "ideologi alternatif". Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaan paradigma pemikiran Amien Rais dan Abdurrahman Wahid dalam konteks tertentu mempunyai implikasi yang berbeda, khususnya dalam merumuskan hubungan Islam (syari'ah) dan demokrasi. Meskipun sama-sama menolak syari'ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimannya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi syari'ah dari penyelewengan atau distorsi dan detereorisasi. Sedangkan Abdurrahman Wahid mendukung demokrasi liberal justru lebih sebagai sebuah keharusan untuk melindungi pluralisme masyarakat bangsa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **ROBERT NANDO**
NPM : 1421020218
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI
PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN
ABDURRAHMAN WAHID**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

Pembimbing II

Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017

**Mengetahui
Ketua jurusan Siyasah**

Drs. Susladi AS., M. Sos. I.
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID** disusun oleh Robert Nando, NPM.1421020218, Program Study : Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman. M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Syeh Syarif Hidayatullah. M.H.I.

(.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

(.....)

Penguji II : Frenki, M.S.I

(.....)



DEKAN
Henry Iwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ أَنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Al-Imran: 159).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009), h. 30.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Zurina Dewi dan Syarifudin sebagai Mama dan Papaku tercinta yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akan ku disetiap langkah dan mengajarkan aku dari kecil yang benar-benar polos maupun suci hingga dewasa saat ini untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Kakak pertamaku Briptu Edy Chandra (Kak Andah).
4. Adik Pertamaku Tomi Erwansyah (Dek Omik).
5. Adik Keduaku Indah Nur Faiza (Yuk Indut).
6. Adik Ketigaku Annisa Putri (Dek Nisut).
7. Kekasih yang menemani hingga saat ini Lilis Yuliana (Nduk mama).
8. Ayuk Iparku Irma Gustia S.Pd. (Yuk Irma)
9. Keluarga besarku tersayang
10. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Robert Nando, lahir pada tanggal 16 April 1995 di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Anak kedua dari empat bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Syarifudin dan Ibu Zurina Dewi. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 01 Karang Anyar (Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2006
2. SMP Negeri 01 Kotabumi (Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2009
3. SMAN 03 Kotabumi Lampung Utara lulus tahun 2012
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
 - a. Kepala Bidang PSDA KOPMA UIN RIL 2017-2018
 - b. Wakil BEM Fakultas Syari'ah 2016-2017
 - c. Ketua BEM Fakultas Syari'ah 2017-2018
 - d. Kader PMII UIN Komisariat UIN Raden Intan Lampung
 - e. Ketua Anak Muda Indonesia (AMI) DPC Lampung Tengah 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.

Skripsi ini berjudul **“ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Frenki, M.Si. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.

6. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk Papa, Mama, kakak, adik dan kekasih. Edy Chandra, Tomy Erwansyah, Indah Nur Faiza, Annisa Putri, Lilis Yuliana (Kekasih), Irma Gustia (Ayuk Ipar) terimakasih atas dukungan dan doa nya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
9. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan Pulung Riyanto, S.sos., Slamet Wiyanto, S.H., Hendri Setiawan, S.H., Mery Hartanto, S.H.,
10. Keluarga besar Kopma UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan nilai-nilai positif.
11. Keluarga besar BEM Fakultas Syari'ah yang selalu memotivasi.
12. Keluarga besar PMII Komisariat UIN RIL Rayon Syari'ah.
13. Keluarga besar AMI Prov. Lampung.
14. Keluarga besar Siyasah A angkatan 2014.
15. Kelurga besar KKN 147 desa kekiling yang telah menemani selama 40 hari di desa Kekiling.
16. Keluarga besar Go Shalter Mahasiswa (Gojek) yang telah banyak memberi pengalaman.

17. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Robert Nando

NPM.1421020218



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Islam di Indonesia	
1. Pengertian Islam.....	12
2. Prinsip-prinsip Ketatanegaraan dalam Islam	14
3. Islam sebagai Nilai dalam Negara Indonesia	22
B. Demokrasi di Indonesia	
1. Pengertian Demokrasi	24
2. Prinsip-prinsip Demokrasi.....	32
3. Demokrasi sebagai Nilai dalam Negara Indonesia	35

C. Relasi Islam dan Demokrasi di Indonesia	38
--	----

BAB III PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pemikiran M. Amien Rais tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia	
1. Biografi M. Amien Rais	41
2. Pokok-pokok Pemikiran M. Amien Rais tentang Islam dan Demokrasi	51
3. Islam dan Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais	53
B. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi	
1. Biografi Abdurrahman Wahid	58
2. Pokok-pokok Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi	64
3. Islam dan Demokrasi di Indonesia Menurut Abdurrahman Wahid	67

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia	73
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid”, yaitu sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang atas perintah Allah SWT.²
2. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, (pemerintahan rakyat).³
3. Indonesia adalah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.⁴
4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian-kajian, telaahan.⁵
5. Perbandingan adalah ilmu yang membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda.⁶
6. Pemikiran adalah proses, cara, perbuatan memikir.⁷

² Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 873.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 310.

⁴ *Ibid*, h. 532.

⁵ *Ibid*, h. 1342.

⁶ <https://kbbi.web.id/anatomi>, diunduh pada 28 September 2017, pukul 07.27.

⁷ *Ibid*. h. 1073.

7. M. Amien Rais lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1944, Beliau adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 - 2004.⁸
8. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940, Beliau adalah seorang tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik dan pernah menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.⁹

Berdasarkan Istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang perbandingan pemikiran politik antara dua tokoh politik nasional yaitu M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid mengenai Islam dan Demokrasi di Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Kedua tokoh nasional M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid merupakan pejuang demokrasi di Indonesia dari kalangan Islam dan kedua tokoh nasional ini pemikiran politiknya tentang Islam dan demokrasi sangat membantu untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia menurut pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.

⁸ Ir. Najib Muhammad dan Kwat Sukardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 18.

⁹ Dr. Masykur Musa Ali, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 10.

2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yakni Siyasa.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Samawi yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui utusan-Nya Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di Dunia maupun di Akhirat.¹⁰ Sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an, wahyu Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui Malaikat Jibril, dan Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Prinsip-prinsip Islam memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila yakni prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.¹¹

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-

¹⁰ M. Karim Abdul, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 15.

¹¹ *Ibid*, h. 81.

olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.¹²

Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya sebagai demokrasi Soviet atau di Indonesia yang awal kemerdekaanya menggunakan istilah demokrasi terpimpin yang setelah itu pada masa orde baru berubah menjadi demokrasi pancasila. Menurut istilah penggunaan kata demokrasi berarti rakyat yang berkuasa.¹³

Sistem ketatanegaraan Indonesia, beberapa nilai pokok demokrasi konstitusional tidaklah dapat disangkal lagi, dimana dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen hal ini terdapat pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut.¹⁴

Menurut pemikiran M. Amien Rais, mayoritas bangsa Indonesia yang memeluk agama Islam pasti memilih sistem politik yang dinamakan demokrasi. Sebab, sistem ini yang paling indah, baik, bahkan mapu menghindari adanya tirani mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya. Dalam konteks konstitusi Indonesia, menurut M. Amien Rais, soal demokrasi

¹² Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang: UMM Pres, 2002), h. 15.

¹³ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Fh UII Press, 2003), h. 140.

¹⁴ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), h.

ini telah terkandung di dalam UUD 1945. Persoalannya adalah, antara teori yang mengatakan “melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekurn” ternyata bertabrakan dengan praktiknya yang tidak konsekuen dan penuh distorsi. M. Amien Rais memberikan penegasan bahwa demokrasi tidak hanya cocok untuk orang barat, untuk Indonesia pun merupakan yang paling baik, apalagi menurut Islam.¹⁵

Kegamangan yang M. Amien Rais rasakan bukan pada konstitusi Indonesia, yang antara lain memuat soal demokrasi, tetapi pada dataran pelaksanaan atau praktik politik yang berjalan di masa pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Karena itulah M. Amien Rais menekankan pentingnya tiga hal untuk diperhatikan dalam rangka membangun demokrasi yang sebenarnya, yaitu pendidikan politik bagi rakyat. Ini dilakukan agar rakyat berani menyatakan pendapat, sekalipun berbeda dengan penguasa. Kemudian pihak penguasa perlu diyakinkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi atau keabsahan yang kuat, mereka perlu didukung rakyat, tetapi bukan dengan cara menakut-nakuti atau menekan rakyat, melainkan dengan member kepercayaan kepada rakyat.¹⁶

Selain itu terdapat juga seorang tokoh politik nasional yaitu Abdurrahman Wahid. Sepak terjang Abdurrahman Wahid ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh pemikiran “*liar*”-nya yang selalu mengedepankan nilai-nilai inklusifisme, selalu berusaha untuk mengambil nilai tengah (moderat). Selain itu, nilai-nilai sekularisme dan liberalisme juga tampaknya

¹⁵ Syam Firdaus, *Di Pentas Politik Indonesia Modern*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 150.

¹⁶ *Ibid*, h. 151.

ikut mempengaruhi pemikirannya. Sebagaimana kebanyakan cendekiawan Muslim Indonesia yang selalu melandaskan demokrasi pada nilai-nilai Islam, maka demikian halnya Abdurrahman Wahid, menyebut Islam sebagai agama demokrasi, *pertama*, Islam adalah agama hukum, yang berarti ajaran Islam berlaku pada semua orang, baik menyangkut pemegang kekuasaan tertinggi maupun rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), perkara-perkara mereka dibicarakan diantara mereka melalui musyawarah. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan, karenanya kehidupan manusia itu tarafnya tidak boleh statis, tetapi harus meningkat terus untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan menurut Abdurrahman Wahid merupakan prinsip dari demokrasi.¹⁷

Abdurrahman Wahid mengartikan demokrasi sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat, ke-nyelenehanya benar-benar dijamin Undang-Undang, sebab menurutnya, “nyeleneh” merupakan salah satu esensi demokrasi. Adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat, adanya kebebasan berpergian, masuk dan keluar negeri tanpa harus dikaitkan dengan masalah politik. Orang yang mengkritik pemerintah sekeras apapun, menurut Abdurrahman Wahid bukan merupakan alasan bagi pemerintah untuk melakukan “cekal”. “Cekal” semestinya diperuntukan bagi mereka yang melakukan tindak kriminal, terlebih kriminal ekonomi. Berperannya kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kekuasaan. Adanya pemisahan secara

¹⁷ Al-Brebesy Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 184.

tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi di antara tiga lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁸

Berdasarkan deskripsi diatas pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais tentang Islam dan Demokrasi terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh politik nasional tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Tujuan penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran politik M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia?
2. Kegunaan penelitian ini antara lain:

¹⁸ *Ibid*, h. 185.

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid. Lalu relevansinya pada Islam dan demokrasi di Indonesia.
- b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Siyash pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁹ Dan membahas dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.²⁰

¹⁹ Joko Suvbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h. 2.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan pembahasan skripsi ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²¹ Sedangkan komperatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²²

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³

²¹ Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 719.

²³ Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok seperti karya M. Amien Rais (Cakrawala Islam, membangun politik adiluhung, tauhid sosial), karya Abdurrahman Wahid (Islam negara dan pancasila, tuhan tidak perlu di bela, muslim di tengah pergumulan), Al-Qur'an, Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer (buku-buku karya M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, Al-Qur'an, Hadist), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini,

analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Pengelolah Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisi data dalam Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, dengan pendekatan content analisis yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan dekskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.²⁴



²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

BAB II ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

G. Islam di Indonesia

1. Pengertian Islam

Islam adalah agama Samawi yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui Utusan-Nya Muhammad SAW, yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunah dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di Dunia maupun di Akhirat. Intisari Islam terkandung dalam kata *islam* yang berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islam*, yang mempunyai beberapa arti, yaitu:

- a. Melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin,
- b. Berserah diri, menundukkan diri, atau taat sepenuh hati, dan
- c. Masuk kedalam *salam*, yakni selamat sejahtera, damai, hubungan yang harmonis, atau keadaan tanpa noda dan cela.

Jadi intisari Islam adalah berserah diri atau taat sepenuh hati kepada kehendak Allah SWT, demi tercapainya kepribadian yang bersih dari cacat dan noda, hubungan yang harmonis dan damai sesama manusia, atau selamat sejahtera di dunia dan akhirat.²⁵

Kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dalam esensial. Secara etimologis, *tauhid* berarti *mengEsakan*, yaitu mengEsakan Allah. Formulasi paling pendek dari tauhid itu ialah kalimat *thayyibah*: *la ilaha illa Allah*, yang artinya *tidak ada Tuhan selain Allah*.

²⁵ M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta:Gama Media, 2013), h. 15.

Ajaran yang utama di dalam Islam adalah beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang dengan kuat ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keselamatan dicapai oleh semua orang yang tunduk kepada Allah, yaitu hidup menurut aturan-Nya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah memerintahkan umat Islam untuk mempercayai adanya malaikat-malaikat. Nabi juga telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya beriman juga kepada para malaikat setelah mereka beriman kepada Allah. Menolak adanya malaikat-malaikat adalah kufur. Al-Quran diterima sebagai wahyu yang langsung dari Allah hingga Nabi Muhammad SAW, (melalui malaikat Jibril), dan karenanya hal itu menjadi dasar bagi semua ajaran Islam.²⁶

Di samping keenam pokok ajaran Islam itu (rukun iman yang keenam), ada lagi lima kewajiban penting yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang taat. Yang lima ini disebut rukun Islam. Prinsip yang pokok dalam ajaran Islam adalah syahadat atau pengakuan keimanan-tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Nabi-Nya. Syahadat lebih menyatakan keimanan seseorang Muslim dari pada merupakan kewajiban syariat (amal). Pelaksanaan shalat berulang kali ditekankan sebagai salah satu dari kewajiban-kewajiban agama yang penting.²⁷

2. Prinsip-prinsip Ketatanegaraan dalam Islam

²⁶ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 3.

²⁷ *Ibid*, h. 4.

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT, karena Allah SWT, adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-qur'an menegaskan bahwa Allah SWT sebagai pemilik kekuasaan yang dapat limpahkan kepada siapa saja yang di kehendaki-Nya, demikian pula sang Maha Esa mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang di kehendaki-Nya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah SWT Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang pada prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Kepemimpinan sebagai amanah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat, (An-nisa:58).²⁸

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 250.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.²⁹

b. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Quran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama terdapat dalam surah Asy-Syuura.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy-Syuura: 38).³⁰

²⁹ Ibid, h. 251.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Surakarta: Al-Karim, 2009), h. 487.

Sedangkan surah yang kedua terdapat pada surah *Al-Imran*.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ حُكْمٌ فَذُنَّ غَالِيَةً فَلْيُحْذَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ حُكْمٌ فَذُنَّ غَالِيَةً
مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Al-Imran:159).³¹

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua menekankan perlunya diadakan musyawarah atau lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu

³¹ *Ibid*, h. 71.

pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.³²

c. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama hal dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surah *al-Nisa*.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

³² J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 208.

*atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan An-Nisa: 135).*³³

Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- i. Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.
- ii. Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-juurnya dan adil..
- iii. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- iv. Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Alquran. Oleh karena itu Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan salah satu nama Allah. Allah adalah sumber kebenaran yang di dalam Al-Quran disebut Al-Haq. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang dikutip Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.

Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 100.

- i. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana.
- ii. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya.
- iii. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.³⁴

d. Prinsip Persamaan

Prinsip Persamaan dalam Islam dapat dipahami dari Al-Quran Surah *Al-Hujurat*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (*Al-Hujurat:13*).³⁵

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia.

Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita.

Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan

³⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 222.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 517.

atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.³⁶

e. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Olehnya itu Al-Quran sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang termaktub dalam surah *al-Baqarah* (2): 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (al-Baqarah:208).*³⁷

f. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-Quran telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain

³⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 149.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 32.

adalah : zakat, sadaqah, hibah, dan wakaf. Mungkin juga dari pendapatan negara seperti pajak, bea, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan menggunakan prinsip ini sesuai dengan penempatannya.³⁸

3. Islam sebagai nilai dalam Negara Indonesia

Nilai hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia harus dibagi ke dalam dua periode:

- a. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yaitu dalam hukum konstitusi dikenal *persuasive-source* dan *authoritatif-source*. Sumber persuasif ialah sumber yang harus diyakinkan untuk menerimanya, sedangkan sumber yang autoritatif ialah sumber yang mempunyai kekuatan (*authority*). Dengan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, walaupun tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta, teori resepsi yang dasar hukumnya Islam maka dengan tidak berlakunya lagi Islam dengan berlakunya UUD 1945, teori resepsi kehilangan dasar hukumnya.³⁹

Selama 14 tahun, dari tanggal 22 juni 1945 waktu ditanda tangani *gentlement agreement* antara pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islam sampai tanggal 5 juli 1959, sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan, kedudukan ketentuan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah *persuasive-source*. Sebagaimana semua hasil sidang-sidang Badan

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.* h. 141.

³⁹ Eddy Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 75.

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan adalah *persuasive-source* bagi *grondwet-interpretatie* dari UUD 1945, maka piagam jakarta adalah sebagai salah satu hasil dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan juga merupakan *persuasive-source* dari UUD 1945.

- b. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif yaitu dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *authoritative source*, sumber autoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekedar *authoritative-source* atau sumber persuasif.⁴⁰

Dengan demikian Presiden Republik Indonesia berkeyakinan, bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Dan karena perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanyalah tujuh kata, maka dari itu berarti bahwa tujuh kata itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945.⁴¹

B. Demokrasi di Indonesia

1. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi”

⁴⁰ *Ibid*, h. 76.

⁴¹ *Ibid*, h. 77.

terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴²

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Proses politik penataan kehidupan bersama ini dikelola secara bersama, dan inilah yang dinamakan oleh Aristoteles sebagai bentuk negara ideal “politeia”, atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl sebagai “polyarchy”, sebagai ganti dari istilah yang kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi yang meluas. Jadi, ciri utama demokrasi purba itu adalah adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis (negara kota) yang jumlah penduduknya relatif kecil.

Perlibatan hampir seluruh warga polis dalam proses penataan negara ini belum melahirkan suasana kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Yunani purba pada waktu itu. Hal ini terbukti dengan masih adanya diskriminasi politik yang meminggirkan hak kaum perempuan dan kalangan budak, maupun anak-anak. Perempuan dan budak dianggap tidak memiliki hak dalam partisipasi politik pengelolaan negara. Mereka tidak memiliki kebebasan yang penuh dan dipandang sama statusnya baik dihadapan hukum maupun ‘pemerintah bersama’ waktu itu. Namun demikian, nilai kebebasan dan kesamaan (persamaan) hak mengeluarkan pendapat itu dipraktikkan secara relatif baik pada seluruh warga polis yang dewasa,

⁴² Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 110.

walaupun ada pengecualian bagi perempuan dan budak. Perempuan, budak, dan anak-anak serta orang asing tidak memiliki hak politik di dalam pengelolaan polis tersebut.⁴³

Adanya pergerakan pembela hak-hak politik kaum perempuan dan adanya gerakan antiperbudakan yang terus bergulir sepanjang sejarah telah mengubah format politik. Format politik partisipatoris yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh, nondiskriminatif, telah lahir menjadi ciri dari sistem politik modern yang lebih egaliter dan beradap. Inilah yang dinamakan persemaian nilai demokrasi.

Persemaian nilai ini menumbangkan legitimasi tradisional yang menyandarkan diri pada klaim-klaim yang tidak rasional, yang sering kali berlakutiran dan korup. Legitimasi religius dan legitimasi aristokratis dimana suatu golongan atau kelas (*caste*) dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin atau untuk berperang, menjaadi nilai yang berlawanan dengan demokrasi. Gerakan demokrasi ini menghatam eksistensi kekuasaan Monarch (raja) dan Teokrasi (dominasi gereja), sehingga format politik kompromis lahir. Hal inilah yang kemudian meratakan jalan menuju demokrasi yang mewujudkan diri dalam bentuk Republik.

Sejarah demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari masalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan negara (*form of*

⁴³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 44.

government). Peninjauan masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai, dalam bentuk apa organisasi negara itu menjelma dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan pembahasannya merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis yang melihat bangunan negara sebagai suatu kebulatan (*Ganzheit*), maka pembahasannya adalah mengenai bentuk negara. Akan tetapi, ditinjau dari segi yuridis yang melihat bangunan negara dalam strukturnya/isinya, maka pembahasannya adalah mengenai bentuk atau sistem pemerintahan.⁴⁴

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dari segi waktu dibagi dalam empat periode yaitu:

a. Demokrasi pada periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan republik Indonesia diproklamkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi

⁴⁴ *Ibid*, h. 46.

kekuatan-kekuatan konstuktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (*Constitutional head*) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional.

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai Presiden untuk mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.⁴⁵

b. Demokrasi Pada Periode 1959-1965

Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai sosial politik. Dekrit

⁴⁵ Dede Rosyada dkk, *Op.cit*, h. 131.

Presiden 5 juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Selain dari itu penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang sedikit menyimpang dari “rel rovolusi” tidak dibenarkan sedangkan politik mercusuar dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah tidak adil. G. 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi pancasila.⁴⁶

c. Demokrasi Pada Periode 1965-1998

Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan UUD yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif.

⁴⁶ *Ibid*, h. 132.

Namun demikian “Demokrasi Pancasila”. Dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim rezim Orde Baru ditandai oleh:

1. Dominannya peranan ABRI
2. Birokratisasi dan Sentralisasi pengambilan keputusan politik
3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik
4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik
5. Masa mengambang
6. Monolitiasi ideologi negara
7. Inkorporasi lembaga non-pemerintah

Dengan demikian nilai-nilai demokrasi belum ditegakkan dalam demokrasi pancasila Soeharto.⁴⁷

d. Demokrasi Pada Periode 1998-Sekarang

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal transisi bagi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan

⁴⁷ *Ibid*, h. 133.

fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi yang akan dibangun.

Menurut Sorensen transisi bentuk pemerintahan (rezim) non-demokratis menjadi demokratis seperti yang tengah terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir merupakan proses yang sangat lama dan kompleks karena melibatkan beberapa tahap. *Pertama*, tahap persiapan (*Preparatory phase*) yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang berakhir dengan jatuhnya rezim non demokratis. *Kedua*, tahap penentuan (*solidation phase*), dimana demokrasi baru dikembangkan. *Ketiga*, tahap konsolidasi (*consolidation phase*), dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Dalam kaitan dengan transisi menuju demokrasi, Indonesia saat ini tengah berada dalam fase kedua dan ketiga.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Abul A'la Maududi yang kemudian dikenal dengan "sosok guru demokrasi".⁴⁹

Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa.

⁴⁸ *Ibid*, h. 140.

⁴⁹ Abdul Abul A'la-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 19-31.

Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.

- b. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
- c. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip (*majority rule*). Maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (*minority rights*).
- d. Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian disini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).

- e. Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).
- f. Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.
- g. Perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Misalnya warga Negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.⁵⁰
- h. Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan

⁵⁰ *Ibid*, h. 19-31.

sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.

- i. Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.
- j. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. *Toleransi* berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. *Kemanfaatan* berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. *Kerjasama* berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. *Kompromi* berarti ada komitmen untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.⁵¹

3. Demokrasi Sebagai Nilai dalam Negara Indonesia

Sejak persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, para bapak pendiri bangsa telah menggunakan istilah demokrasi untuk mensifati sistem politik di Indonesia. Cita-cita sistem demokrasi bahkan

⁵¹Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, h. 123

sedah diungkapkan oleg Sarikat Islam (SI) pada tahun 1917. Secara historis, sejak kemerdekaannya tahun 1945, bangsa Indonesia telah menjalankan tiga bentuk demokrasi, yaitu Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila (1965-sekarang). Setiap bentuk demokrasi tersebut sebetulnya menggunakan Pancasila sebagai falsafah negara. Respon terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia di bagi menjadi tiga respon yaitu:

a. Respon terhadap Nilai Persamaan

Persamaan di antara manusia merupakan salah satu hak yang paling fundamental bagi warga negara, dan merupakan salah satu dari tiga nilai yang dituntut oleh Revolusi Prancis. Deklarasi kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu sendiri menyatakan “.... *that all men are created equal*” (seluruh semua manusia diciptakan sama).⁵²

Sementara itu menurut Nurcholish Madjid menekankan persamaan dalam wilayah etik dan politik, lalu menurut Amien Rais dan Azhary menekankan persamaan hukum (persamaan di muka hukum). Menurut mereka, persamaan dimuka hukum berarti bahwa hukum harus berlaku bagi semua warga negara dan harus dipatuhi oleh semuanya tanpa adanya perbedaan atas dasar latar belakang mereka.⁵³

b. Respon terhadap Nilai Kebebasan

⁵² Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 111.

⁵³ *Ibid.* h. 115.

Sudah jelas bahwa kebebasan itu salah satu syarat untuk mewujudkan sistem yang demokratis, namun ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan teoretikus politik tentang hubungan kebebasan antara kebebasan politik. Menurut Norman P. Barry, kebebasan politik berhubungan dengan rezim demokrasi, dan ia mencakup hak suara, berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi pemerintah. Karena terdapat perbedaan cakupan antara kebebasan dan kebebasan politik, maka adalah mungkin suatu masyarakat itu bebas tanpa adanya kebebasan politik.

Mungkin suatu rezim demokrasi yang bercirikan partisipasi dan kehendak umum, menekan kebebasan individu. Namun demikian, sebuah sistem demokratis harus memberi beberapa pengakuan yang mempertimbangkan kebebasan rakyat yang sungguh-sungguh untuk berkumpul, mengkomunikasikan ide-ide, dan berbeda dengan pemerintah. Kebebasan atau kemerdekaan ini didefinisikan sebagai “tidak adanya suatu pemaksaan atau rintangan”.⁵⁴

c. Respon terhadap Nilai Pluralisme

Secara historis, *Pluralisme* didefinisikan dengan sebuah aliran filsafat, yang menentang konsep negara absolut dan berdaulat. Sementara pluralisme klasik merupakan reaksi terhadap doktrin hukum tentang kedaulatan negara, pluralisme kontemporer, yang

⁵⁴ *Ibid*, h. 134.

muncul tahun 1950an, dikembangkan tidak untuk menentang kedaulatan negara tetapi menentang teori-teori tentang elit.

Untuk melindungi dan menegakan pluralisme sosial, diperlukan adanya nilai-nilai toleransi. Dalam sejarah filsafat politik liberalisme sangat dekat diidentifikasi dengan nilai-nilai ini, begitu juga dengan nilai-nilai kebebasan individu.⁵⁵

Demokrasi yang secara resmi mengkristalkan di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural upaya memberikan pengertian bagi “Demokrasi Pancasila” sudah banyak dikemukakan. Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, h. 146.

⁵⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 43.

C. Relasi Islam dan Demokrasi di Indonesia

Kenyataan menunjukkan bahwa demokrasi selalu menjadi perhatian kemanusiaan sejagad. Ia adalah pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolaknya sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Termasuk di Indonesia, gagasan demokrasi dan demokratisasi terus menggulir seiring dinamika politik.⁵⁷

Bagi kalangan neo-modernisme Islam, demokrasi dan Islam sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara Islam diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Ada tiga hal nilai pokok demokrasi: kebebasan, keadilan, dan musyawara. Yang dimaksud *kebebasan* adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Yang kedua *keadilan*, merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukannya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mrngatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan untuk rnencapainya. Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat

⁵⁷ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 63.

halangan untuk mengekspresikan cita-citanya. Nilai demokrasi yang ketiga *musyawara/syura*, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu melalui jalur permusyawaratan. Karena nilai-nilai pokok dalam demokrasi sedemikian itulah maka sesungguhnya menurut Abdurrahman, paham demokrasi memiliki kesamaan yang kuat dengan misi Islam. Sebab Islam pada dasarnya adalah juga untuk menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, beliau tegas menolak bila demokrasi diperlawankan dengan Islam.⁵⁸

Menurut Nurcholish Madjid terdapat banyak titik temu antara Islam dan demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita untuk kebaikan semua. Maka tidak heran jika penerimaan umat Islam terhadap demokrasi bersifat sangat alami.

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah, sistem politik demokrasi itu dapat berjalan sejalur dengan misi Islam. Ia bahkan dapat disebut yang paling baik dan paling tepat, karena dengan mekanismenya yang wajar ia bisa menghindarkan adanya tirani mayoritas atas minoritas dan tirani minoritas diatas mayoritas, yang keduanya sama-sama berbahaya. Oleh karena Islam dan demokrasi di Indonesia sangat relevan dan sejalan diantara keduanya antara misi Islam dan demokrasi.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, h. 65-66.

⁵⁹ *Ibid*, h. 67.

BAB III

PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pemikiran M. Amien Rais tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia

1. Biografi M. Amien Rais

a. Riwayat Hidup

Muhammad Amien Rais lahir di Solo, 26 April 1944. Ayah beliau bernama Suhud Rais (alm), lulusan Muallimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya menjadi pegawai Departemen Agama. Sedangkan ibu beliau bernama Ny. Sudalmiyah, sekitar 20 tahun menjadi ketua Aisyiyah Surakarta, yaitu organisasi wanita Muhammadiyah. Kakeknya bernama Wiryo Soedarmo, beliau sebagai pendiri Muhammadiyah di Gembong Jawa Tengah. Anak kedua dari enam saudara itu mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah Solo mulai dari TK hingga SMA. Amien sendiri pernah mengenang bahwa seandainya pada tahun 1962 dulu sudah ada Universitas Muhammadiyah, beliau pasti tidak masuk UGM.⁶⁰

Muhammad Amien Rais merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Kakaknya Fatimah, dan keempat adiknya adalah Abdul Rozak, Achmad Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Asyiah. Mereka tumbuh dan dibesarkan di kampung Kepatihan Kulon. Sejak kecil mereka sudah di latih disiplin oleh sang ibu. Bila Amien kecil melanggar, sang ibu tidak segan-segan untuk menghukumnya. Mereka harus bangun pukul 04.00 WIB setiap paginya. Caranya dengan meletakan jam weker di dekat tempat tidurnya, dan ketika bangun mereka diminta untuk mengucapkan “ashalatu khairum minan naum” dengan suara keras sehingga terdengar sang ibu. Sang ibu biasanya memberikan imbalan berupa uang 50 sen. Uang tersebut kemudian di tabung untuk dibelikan baju baru menjelang lebaran.⁶¹

Walaupun tegas, tetapi sang ibu tidak pernah memaksakan kehendaknya, anak-anaknya dibiarkan tumbuh secara alami, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Hanya saja, pesan sang ibu yang tak pernah putus adalah mengingatkan mereka bahwa

⁶⁰ Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 17.

⁶¹ *Ibid*, h. 19.

hakikat hidup adalah ibadah. Yang terus diingat Amien, ketika ibunya berkata, "Ingat Amien, berkemah pun ibadah."

Dalam berbagai kesempatan, M. Amien Rais secara terus terang mengakui bahwa ibunya adalah yang sangat mempengaruhi karakternya yang lugas tanpa basa-basi. Sampai kini M. Amien Rais masih menempatkan ibunya sebagai konsultannya dan tempat pelipur-lara. Mana kala beliau menghadapi situasi atau persoalan pelik, beliau selalu pulang ke Solo menemui sang ibu untuk meminta pendapatnya, atau hanya untuk menghindari kejaran wartawan yang pantang beliau tolak. Setiap Idul Fitri beliau beserta semua saudaranya juga berkumpul di rumah sang ibu. Menurut M. Amien Rais, hingga usia 80-an, ketegasan dan kejernihan berfikir ibunya masih tetap seperti dulu. Ibunda M. Amien Rais wafat hari Jum'at, 14 September 2001 di Solo, Jawa Tengah, dalam usia 89 tahun.⁶²

Sewaktu masih duduk di bangku SD, M. Amien Rais kecil bercita-cita ingin menjadi walikota. Cita-cita ini sangat dipengaruhi oleh kekagumannya pada Muhammad Saleh yang menjabat Walikota Solo pada waktu itu. Muhammad Saleh adalah seorang muslim yang taat. Beliau sering memberikan pengajian di Balai Muhammadiyah Solo. Walikota asal Madura ini sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Namun setelah SMA, cita-cita M. Amien Rais berubah. Beliau ingin menjadi duta besar, mungkin cita-cita ini yang ikut mempengaruhinya untuk memilih jurusan hubungan internasional ketika memasuki perguruan tinggi.

Prinsip hidup yang menjadi pegangannya diakuinya sangat sederhana, yaitu mencari ridha dan ampunan Allah. Untuk mencapainya, orang harus berbicara dan berbuat apa adanya. "You are what you are," katanya suatu ketika. Beliau membagi kebahagiaan menjadi tiga jenis, yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan intelektual dan kebahagiaan psikologis. Kebahagiaan spiritual diperoleh dengan cara menjalani hidup sesuai dengan rel agama. Kebahagiaan intelektual diperoleh dengan cara memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat. Sedangkan kebahagiaan psikologis didapatnya bila beliau bisa berbuat atau menolong orang lain.⁶³

Muhammad Amien Rais menikah pada 9 Februari 1969, dengan seorang gadis yang sudah lama dikenalnya sejak mereka masih sama-sama kanak-kanak, Kusnasriyati Sri Rahayu. Selama sepuluh tahun pertama pernikahannya beliau belum dikaruniai anak, meskipun beliau

⁶² *Ibid*, h. 20.

⁶³ *Ibid*, h. 21.

sudah berkonsultasi dengan banyak dokter spesialis kandungan di Solo, Yogyakarta, bahkan ketika berada di Chicago. Sampai suatu saat mereka berdua mendapat kesempatan naik haji ke Mekkah. Di depan Ka'bah mereka berdua memanjatkan doa, mohon kepada Allah agar memenuhi keinginan mereka akan keturunan. Waktu itu mereka sedang melakukan penelitian di Mesir. Setelah kembali ke Kairo, dua bulan lebih sang istri tidak dikunjungi tamu rutin bulanan. Bahkan, ada yang aneh perutnya terasa gatal-gatal. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi kedokter kandungan, dan hasilnya positif, sang istri dinyatakan hamil. Bagi mereka berdua, kejadian itu merupakan mukjizat dari Allah semata. Setelah anak yang pertama lahir, selanjutnya setiap dua tahun sang istri hamil lagi. Kini mereka sudah dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Nama-nama mereka diambil dari Al-Quran dan dikaitkan dengan kenangan dan peristiwa yang menyertai kelahirannya. Yang pertama diberi nama Ahmad Hanafi, kemudian Hanum Salsabiela, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan yang terakhir Ahmad Baihaqy.⁶⁴

Bila Allah mengaruniainya umur panjang, di masa tuanya nanti M. Amien Rais hanya ingin melihat anak-anaknya bisa menyelesaikan pendidikannya masing-masing. Sementara beliau sendiri ingin mengisi masa tuanya dengan menulis dan memberikan pengajian. M. Amien Rais merujuk pada almarhum A.R. Fachruddin dan ibunya sendiri yang sampai akhir hayatnya masih memimpin sekolah Muhammadiyah di Solo. Ibunya adalah wanita luar biasa, keberanian dan ketegaran yang di miliki oleh M. Amien Rais ternyata tidak terlepas dari peran sang istri. Suatu saat, ketika di interview seorang wartawan Jepang, saya melihat dengan nada bangga M. Amien Rais mengatakan, "Istri saya mungkin merupakan wanita terbaik se-Asia Tenggara." Komentar tersebut mungkin terasa berlebihan bagi kebanyakan orang, tetapi tidak bagi M. Amien Rais. Beliau pernah menceritakan kepada saya bahwa ketika studi di Chicago, karena beratnya beban kuliah yang dihadapi, hampir saja ia putus asa. Untung ada sang istri yang terus memompa semangatnya. Begitu juga ketika beliau merasa lelah saat melawan Orde Baru, istrinya tidak pernah lelah untuk membangunkan kembali spiritnya. Sampai-sampai beliau pernah mengomentari istrinya sebagai sumber inspirasi dan motivasinya. Bahkan menjelang tumbangnya Soeharto, sempat tersebar isu bahwa M. Amien Rais akan di tangkap. Beliau kemudian memberi tahu sang istri tentang berita buruk yang akan menimpanya.

⁶⁴ *Ibid*, h. 23.

Dengan nada tegas sang Istri menjawab, “InsyaAllah ini akan mempercepat kejatuhan rezim Soeharto.”⁶⁵

b. Riwayat Pendidikan

M. Amien Rais dikenal luas sebagai pakar politik dan belalangan populer sebagai seorang “tokoh reformasi” yang dengan gigih konsisten bersama para “tokoh reformasi” lain seperti Nurcholish Madjid dan Emil Salim, serta didukung secara aktif oleh para mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Menyelesaikan kuliahnya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1968. Di samping itu, beliau juga meraih gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 1969.

Pada tahun 1974, beliau menyelesaikan Program Masternya dalam bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame, Amerika Serikat, dan berhasil memperoleh Certificate on East European Studies dari Universitas yang sama. Selanjutnya, gelar Doktor Ilmu Politik diraihnya dari University Of Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1981, dengan disertasi yang membahas “Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir”. Pernah juga mengikuti Post-Doktoral Program di George Wongsington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988.⁶⁶

Sejak adanya isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir ke-73 Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993, Muhammad Amien Rais telah menjadi seorang intelektual Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan disegani. M. Amien Rais telah masuk dalam barisan elit intelektual Indonesia yang diperhitungkan dan didengar pemikirannya. Beliau pun tidak pernah bosan-bosan mengungkapkan berbagai bentuk anomali (penyimpangan) sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesenjangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi, manipulasi dan praktek-praktek ekonomi-politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral-etik dikritiknya secara tegas dan berani.

M. Amien Rais adalah fenomena baru dalam sentrum intelektualisasi Muhammadiyah kontemporer, beliau berhasil mendobrak “kemapanan kauman” Yogyakarta, meskipun beliau

⁶⁵ *Ibid*, h. 19.

⁶⁶ Amien Rais, *Tauhid Sosial*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 5.

merupakan pewaris tradisi Muhammadiyah yang digambarkan sebagai tradisi urban modern. Beliau juga mendobrak kepasifan tradisi intelektual Muhammadiyah yang kurang berani melakukan kritik terhadap kekuasaan khususnya di tingkat suprastruktur. Keberanian dan kevokalan pemikiran M. Amien Rais merupakan akumulasi (perubahan) dari latar belakang yang cukup beragam, mulai dari tradisi modernisme Muhammadiyah, lingkungan kauman, serta pengalaman intelektual yang cukup panjang. Dibesarkan ditengah keluarga dan lingkungan yang mempunyai ikatan tradisi Muhammadiyah yang kuat, M. Amien Rais relatif bisa berkenalan dengan gagasan modernisme Islam sejak awal.⁶⁷

Selain itu kevokalan pemikiran M. Amien Rais sangat dipengaruhi oleh perkenalan dan pengamatannya terhadap gerakan-gerakan Islam radikal di Timur Tengah, khususnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang menjadi objek penelitian disertasinya. Adapun kemungkinan yang paling mendekat kebenaran adalah kevokalan pemikiran M. Amien Rais mulai naik secara signifikan sejak beliau berkenalan dengan gerakan-gerakan Islam radikal. Tulisan-tulisannya yang muncul pada tahun 1980-an atau setelah beliau kembali dari Amerika Serikat, menunjukkan adanya korelasi positif antara pemikirannya dan pemikiran-pemikiran yang berkembang dikalangan kelompok Islam radikal Timur Tengah.⁶⁸

Sebagai intelektual Islam dan sekaligus ilmuwan politik, beliau merupakan kolumnis yang tergolong produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Antara lain telah menelurkan sejumlah karya seperti Cakrawala Islam, Keajaiban Kekuasaan, Moralitas Muhammadiyah, Visi dan Misi Muhammadiyah, dan lain-lain. Hingga kini beliau merupakan satu diantara segelintir pakar di Indonesia yang mendalami masalah Timur Tengah. Pakar dari Universitas Gadjah Mada tersebut, kini juga menjadi intelektual pertama yang duduk di pucuk pimpinan Muhammadiyah, organisasi keagamaan (modernis) terbesar di Indonesia.

Lewat sidang Tanwir Muhammadiyah di Solo 23-31 Desember 1994, beliau secara aklamasi dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sampai digelarnya muktamar ke-43 Muhammadiyah di Banda Aceh 1-5 Juli 1995. Sebelumnya, sejak 8 Juli 1994 menjadi pejabat Ketua PP sehubungan dengan

⁶⁷ Amarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 83-85.

⁶⁸ *Ibid*, h. 86-87.

meninggalnya Prof. K.H. Ahmad Azhar Basyir M.A. pada tanggal 28 Juni 1994. Kemudian pada Mukhtamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 M. Amien Rais terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁶⁹

Selain menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau juga menjadi salah seorang yang ikut membidangi kelahiran ICMI (Ikatan Cedikiawan Muda Indonesia) yang dinilai sangat dekat dengan kepentingan pemerintah. Seperti kita tahu, M. Amien Rais merupakan salah satu seorang dari 49 orang penanda tangan pendirian ICMI di Malang, Desember 1990. Dalam kepengurusan ICMI beliau antara lain telah duduk sebagai Ketua Dewan Pakar dan Asisten 1 Ketua Umum. Beliau masih ditambah dengan jabatannya sebagai Direktur Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK).⁷⁰

c. Karya-karya M. Amien Rais

Muhammad Amien Rais termasuk penulis yang produktif yang senantiasa memperjuangkan ciita-cita kebebasan dan demokrasi. Diantaranya karya-karyanya ini ada yang berupa hasil penelitian dan bentuk buku, sebagai berikut:

1. Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980-an (Litbang Deplu RI)
2. Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1987)
3. Politik Internasional Dewasa Ini (Surabaya: Usaha Nasional, 1989)
4. Timur Tengah dan Krisis Teluk (Surabaya: Amarpress, 1990)\
5. Keajaiban Kekuasaan, (Yogyakarta: Bentang Budaya-PPSK, 1994)
6. Moralitas Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta: Penerbit Pena, 1995)
7. Demi Kepentingan Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
8. Refleksi Amien Rais, Dari Persoalan Semut Sampai Gajah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

⁶⁹ *Ibid*, h. 88.

⁷⁰ *Ibid*, h. 90.

9. Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
10. Suara Amien Rais Suara Rakyat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
11. Amien Rais Sang Demokrat (Jakarta: Gema Insani Press. 1998)
12. Amien Rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya, (Bandung: Mizan, 1999)
13. Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais (Jakarta: Serambi, 1999).⁷¹

2. Pokok-pokok Pemikiran M. Amien Rais tentang Islam dan Demokrasi

M. Amien Rais sepakat dengan definisi demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*government of the people and for the people*). Politik dan agama sering dipahami secara terpisah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seolah tidak ada keterkaitan fungsional dan organik antara politik dan agama serta politik dan dakwah. Bahkan ada kesan dalam masyarakat seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan, dan berbagai konotasi buruk lainnya. Bagi M. Amien Rais persepsi politik yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca mata agama dan dakwah, pandangan politik seperti ini juga sangat merugikan. Menurut M. Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila

⁷¹ *Ibid*, h. 92.

moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Sebagaimana diungkapkan M. Amien Rais:

“Politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian penting peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah panglima. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.”⁷²

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Dalam hubungan ini, M. Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi. M. Amien Rais menggambarkan yang dimaksud dengan sekulerisasi dan komponen-komponennya adalah, *disenchanment of nature*, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. *Disenchanment of nature* berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk

⁷² Firdaus Syam, *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 143.

mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut.

Namun, menurut M. Amien Rais, dengan demikian tidak berarti lantas kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawinya sendiri, dan terlepas dari ajaran-ajaran pokok (fundamentals) agama Islam. Bagi M. Amien Rais, membangun suatu negara yang terlepas dari fundamentals ajaran Islam berarti membangun negara yang sekularistik, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba-material, yang di dalamnya petunjuk wahyu hanya disebut-sebut secara berkala dalam kesempatan-kesempatan tertentu.⁷³

3. Islam dan Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais

Dapatkah Islam menerima Pancasila? Pertanyaan ini sangatlah penting dikemukakan, sebab pada masa periode 80an ketika Pancasila akan dijadikan asas satu-satunya bagi kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara, menimbulkan perdebatan tarik-menarik sekaligus menimbulkan persepsi dan interpretasi yang berbeda. Kemudian timbul kecurigaan dan kekhawatiran kalangan tertentu, timbul suatu anggapan bahwa umat Islam menolak Pancasila dan kemudian,

⁷³ *Ibid*, h. 145.

melalui opini dan isu, umat Islam disudutkan sebagai kelompok (anti-Pancasila).

Padahal bila diamati butir demi butir yang ada dalam dasar negara itu sangat selaras dengan ajaran Islam. Bahkan dasar negara itu disusun dan dirumuskan oleh kalangan Islam. Mengenai hal ini, M. Amien Rais secara kritis, berani dan terbuka tetapi penuh kehati-hatian, memberikan sikapnya. Beliau dengan tegas menjawab tentang penerimaan Pancasila.

Selama Pancasila itu dimengerti secara wajar dan benar. Oleh karena itu, tidak ada satupun nilai-nilai Pancasila yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Akan tetapi jika kemudian Pancasila itu di tafsirkan terlalu jauh dan dibumbui yang aneh-aneh, yang sama sekali yang tidak hubungannya dengan Pancasila itu sendiri, seperti ketika ia dilahirkan, maka masalahnya dapat menjadi lain.⁷⁴

Menurut M. Amien Rais selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan semua sila itu dipraktikkan, itu sudah bagus sekali. Tetapi jika Pancasila hanya merupakan formalisasi kosong, tentu keadaan demikian harus kita hadapi bersama. Kaum muslimin Indonesia sudah berbahagia jika Pancasila yang indah itu benar-benar di praktikkan secara konsisten. Dengan demikian berarti sebagai ajaran Islam sudah dijalankan.

Berbicara tentang demokrasi, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan pribadi Amien Rais, karena beliau sendiri menjadi penggerak demokrasi di Indonesia, berarti memang Integritasnya sangat pro-

⁷⁴*Ibid*, h. 148.

demokrasi. Pemikiran Amien Rais mengenai demokrasi pada dasarnya tidak jauh beda dengan gagasan demokrasi yang dikemukakan para cendekiawan Indonesia lainnya, termasuk cendekiawan muslim tentunya.

Yang membedakan adalah, dalam membicarakan demokrasi selalu tidak dilepaskan kaitannya dengan posisi umat atau perjuangan politik umat Islam. Hal lain yang menjadi keyakinannya adalah bahwa dengan demokrasi secara baik dan benar, maka nasib rakyat akan lebih baik. Untuk itu, beliau memberikan pandangan bagaimana langkah yang strategis untuk mencapai demokrasi, yaitu yang paling utama dengan pendidikan. Demokrasi juga disebutkan sangat paralel dengan ajaran Islam.⁷⁵ Di dalam tulisannya yang bertajuk *Indonesia dan Demokrasi*, yang dimuat dalam satu terbitan buku tahun 1983, Amien Rais mengemukakan apa arti demokrasi sebagai sistem politik terbaik di Indonesia. Demokrasi itu jelas artinya jika memiliki lima persyaratan yang sangat elementer, yaitu:

Pertama, ia menjamin berlangsungnya mekanisme *checks and balance* antara mereka yang sedang berkuasa atau memerintah dengan mereka yang tidak sedang berkuasa, dengan memenuhi atauran-aturan permainan secara legal konstitusional, *kedua*, demokrasi menjamin setidaknya empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama dan kebebasan dari rasa takut, *ketiga*, dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip *the*

⁷⁵ *Ibid*, h. 149.

people control the leaders dan bukan berlaku sebaliknya. Prinsip ini prinsip penting dalam demokrasi, sedangkan prinsip *the leaders control the mass* adalah prinsip otoritarianisme, *keempat*, dalam demokrasi ada kesediaan *sharing of power* atau kesediaan untuk membagi kekuasaan dengan pihak lain agar tercapai keseimbangan harmonis, di antaranya dengan kekuatan-kekuatan sosial politik, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang menjadi warga negara kelas dua atau di kesampingkan, *kelima*, demokrasi menjamin rakyat untuk menempatkan para wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan secara bebas. Pemerintah tidak berhak mencampuri proses representasi ini, kecuali jika jelas-jelas calon wakil rakyat itu jelas penghianat negara.

Menurut M. Amien Rais, mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam pasti memilih sistem politik yang dinamakan demokrasi. Sebab, sistem yang paling indah, baik, bahkan mampu menghindari adanya tirani mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya.⁷⁶

Kegamangan yang M. Amien Rais rasakan bukan pada konstitusi kita, yang antara lain memuat soal demokrasi, tetapi pada tataran pelaksanaan atau praktik politik yang berjalan dimasa pemerintahan orde baru pada saat itu. Karena itulah M. Amien Rais menekankan pentingnya tiga hal untuk diperhatikan dalam rangka membangun demokrasi yang sebenarnya, yaitu pendidikan politik pada rakyat, sekali pun berbeda

⁷⁶ *Ibid*, h. 150.

dengan penguasa. Kemudian pihak penguasa perlu diyakinkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi atau keabsahan yang kuat, mereka perlu didukung rakyat, tetapi bukan dengan cara menakut-nakuti atau menekan rakyat, melainkan dengan memberikan kepercayaannya kepada rakyat.

Hal ini adalah pentingnya peranan kaum intelektual dalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi. Namun M. Amien Rais melihat, dalam konteks kehidupan berbangsa bagi umat Islam, demokrasi belum terimplementasikan. Sebab, umat Islam belum diperlakukan secara adil, masih ada kepincangan dalam praktek keadilan, baik disektor ekonomi maupun di bidang lainnya. Hal ini memberi makna bahwa demokrasi belum berjalan secara benar.⁷⁷

Demokrasi sendiri bagi M. Amien Rais diibaratkan seperti halnya sebuah pohon, yang berproses dari bibit, kemudian mulai bertunas dan tumbuh menjadi besar dan mempunyai kembang atau berubah yang bermanfaat bagi masyarakat. Pohon ini akan kurus dan tidak berguna sama sekali, sangat tergantung pada tingkat kesuburan tanah, ekosistemnya dan tentu saja pemeliharanya. Begitu halnya demokrasi, akan tumbuh sangat cepat, indah dan berguna bagi masyarakat, atau sebaliknya menjadi parasit bagi masyarakat, sangat bergantung pada para pendukung demokrasi itu sendiri. Disini keseriusan masyarakat pendukung demokrasi sangat diperlukan untuk mengantarkan demokrasi pada posisi yang bisa memberi kemaslahatan bagi masyarakat.

⁷⁷ *Ibid*, h. 151.

Demokrasi menurut M. Amien Rais juga sering menggunakan pendekatan demokrasi dalam konteks perjuangan umat Islam, dalam pandangan M. Amien Rais, bila umat Islam ingin membangun masyarakat kearah yang lebih baik, maka tidak bisa lain kecuali perjuangan politik umat Islam disalurkan lewat demokrasi. Demokrasi menurut M. Amien Rais sebuah sistem kedaulatan berada ditangan rakyat dan aspirasi dari rakyat untuk mengejawantahkan di dalam kehidupan eksekutif dan legislatif.⁷⁸

B. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi

1. Biografi Abdurrahman Wahid

a. Riwayat Hidup

Abdurrahman Addakhil, demikian nama lengkap secara leksikal “Addakhil” berarti sang penakluk. Sebuah nama yang diambil dari keturunan Dinasti Bani Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol (Andalusia). Belakang kata Addakhil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, Gus adalah kehormatan khas pesantren kepada seorang anak Kiai yang berarti “Abang” atau “Mas”.

Abdurrahman Wahid adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denayar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Gus Dur adalah keturunan “darah biru”.

⁷⁸ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amien Rais tentang Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999), h. 230.

Ayahnya K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) organisasi masa Islam terbesar di Indonesia dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan mereka adalah keturunan Raja Brawijaya VI, yang berkuasa di Jawa pada abad XVI M, dan terkenal sebagai salah seorang Raja terakhir kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Jawa. Bahkan yang lebih penting lagi tokoh legendaris Joko Tingkir, putra Brawijaya VI, dianggap sebagai orang yang memperkenalkan agama Islam di daerah pantai timur laut pulau jawa, sedangkan putranya pangeran Benawa, dikenang sebagai orang pertama yang meninggalkan kerajaan untuk mengajarkan sufisme.⁷⁹

Ny. Hj. Sholehah adalah putri dari pendiri Pesantren Denayar Jombang. K.H. Bisri Syansuri, kakek dari pihak ibunya juga merupakan tokoh NU, yang menjadi Rais 'Aam PBNU setelah K.H. Abdul Wahid Habullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU, sekaligus dua tokoh bangsa Indonesia. Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek K.H. Hasyim Asy'ari saat serumah dengan kakeknya. Beliau diajari mengaji dan membaca Al-Qur'an pada sang ayah. Sejak masa-masa kanak-kanak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU.

⁷⁹ Greg Barton, *Biografi Gusdur. The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKIS, 1977), h. 27.

Pada hari sabtu tanggal 18 April 1953, Gus Dur berpergian menemani ayahnya untuk suatu pertemuan NU di Sumedang. Gus Dur pergi bersama ayahnya dan ditemani seorang sahabat ayahnya Argo Sutjipto. Disuatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung. Mobilnya mengalami kecelakaan, Gus Dur selamat dalam kecelakaan itu akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.

Pada tahun 1954, setahun setelah beliau menamatkan sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), beliau terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Dikarenakan beliau lebih tertarik menonton sepak bola dan menonton film sehingga beliau gagal dalam pelajaran. Oleh karena itu beliau cukup pandai walaupun pada saat yang sama beliau cenderung bermalas-malasan hingga saat itu Gus Dur belum pernah belajar keras. Beliau segera menjadi bosan dengan pelajaran di kelas, karena pelajaran-pelajaran yang di terimanya di kelas beliau rasakan tidak cukup menantang. Ketika sang ibu berjuang sendirian untuk membesarkan keenam anaknya, sementara Gus Dur sendiri kurang berhasil dalam pelajaran dari sekolahnya, beliau dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah di SMP. Di kota ini beliau berdiam di rumah salah seorang teman ayahnya, Kiai Junaidi. Kiai Junaidi adalah seorang anggota Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah. Pengalaman awal ini, yang merupakan

warisan pandangan luas sang ayah, membentuk pandangan Gus Dur setelah dewasa nanti.

Untuk melengkapi pendidikan Gus Dur maka diaturlah agar ia dapat pergi ke Pesantren Al-Munawir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak sedikit diluar Yogyakarta, disini beliau belajar bahasa Arab kepada K.H. Ali Ma'shum. Ketika di Jakarta, kemampuan bahasa Arab Gus Dur masih pasif. Beliau memang sudah menguasai bahasa Inggris dan Belanda, namun ketika di Yogyakarta kemampuan membaca Gus Dur melesat jauh, beliau melahap banyak buku. Menjelang pertengahan tahun 1950-an, Yogyakarta telah mendapatkan ciri khasnya sebagai kota pelajar.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta pada tahun 1957, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Beliau bergabung dengan Pesantren Tegal Rejo di Magelang, ia tinggal di Pesantren ini hingga pertengahan tahun 1959. Disini, beliau belajar kepada Kiai Khudori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. Pada saat yang sama, beliau belajar paro waktu di Pesantren Denayar Jombang, di bawah bimbingan kakeknya dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syansuri.

Pada bulan November 1963 Gus Dur berangkat ke Kairo Mesir, karena mendapat beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas terkenal yang telah berusia ribuan tahun, Al-Azhar. Bagi mereka yang menjadi daya tarik terbesae di kota Kairo Universitas Al-

Azhar, Universitas tertua di Dunia yang sudah berusia ribuan tahun, Universitas ini berabad-abad lebih tua dari pada Oxford, Cambridge, Sorbone dan Universitas-universitas lainnya di Eropa.

Meskipun pada awalnya Gus Dur sangat bersemangat dengan studinya di Al-Azhar, beliau kemudian sangat merasa kecewa oleh karena masa keemasan Al-Azhar telah mencapai puncaknya beberapa dasawarsa sebelumnya. Menurut Gus Dur pada saat beliau tiba di Al-Azhar beliau diberitahu oleh pejabat-pejabat Universitas itu bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuan mengenai bahasa Arab. Dari studinya di Jombang pada tahun 1960-an, Gus Dur sebenarnya telah mempunyai sertifikat yang menunjukkan bahwa beliau telah lulus studi yuris-prudensi Islam, teologi, dan pokok-pokok ajaran lain yang terkait, yang keseluruhannya itu memerlukan pengetahuan bahasa Arab yang sangar baik, sayang beliau tidak mempunyai ijazah yang menunjukkan bahwa ia telah lulus kelas dasar bahasa Arab. Sebagai akibatnya beliau dimasukkan ke kelas yang benar-benar kelas pemula.

Pada tahun 1966 Gus Dur menerima kabar baik lainnya beliau mendapat tawaraan beasiswa di Universitas Baghdad, menurutnya salah satu alasan mengapa beliau bersedia pergi ke Baghdad adalah karena kekecewaannya terhadap pemerintahan Nasser yang otokratik (pemerintahan oleh seorang penguasa secara penuh dan tak terbatas masanya dan turun temurun, lawan demokrasi) sehingga beliau

merasa tidak betah tinggal di Mesir. Mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Baghdad menyebutnya kota ini sebagai kota kosmopolitan yang penuh vitalitas. Selama tiga tahun di Baghdad Gus Dur juga belajar bahasa Prancis.

Pada pertengahan tahun 1968, Nuriyah yang saat itu telah resmi bertunangan dengan Gus Dur, orang tua Nuriyah memutuskan sebelum Nuriyah meneruskan studi dan mondok di Yogyakarta, yang menarik bagi dirinya dan Gus Dur adalah saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan formal, akan tetapi ada suatu persoalan. Ketika akan dilaksanakan pernikahan Gus Dur masih berada di Irak, tetapi permasalahan tersebut terpecahkan oleh karena Gus Dur tidak dapat hadir dalam pernikahan itu. Maka dalam pernikahannya ia diwakili oleh kakeknya, Kiai Bisri Syansuri.

Pada tahun 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi empat tahunnya di Universitas Baghdad dan kemudian beliau pun pindah ke Eropa. Perjalanan Gus Dur ke Eropa melengkapi pengalamannya ini. Dengan tinggal di Eropa, beliau mempunyai kesempatan untuk mempelajari dari tangan pertama sifat masyarakat di Belanda, Jerman, dan Prancis. Gus Dur akhirnya tinggal enam bulan di Belanda, dari Belanda beliau pindah ke Jerman dan tinggal disini selama empat

bulan dan kemudian beliau tinggal di Prancis selama dua bulan. Setelah itu beliau kembali ke Tanah Air.⁸⁰

b. Karya-karya Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Adapun buku-buku atau artikel dari ide pemikirannya, khususnya yang ada kaitannya dengan masalah ini adalah:

1. Bunga Ramapi Pesantren: Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid (1970-1977)
2. Muslim di Tengah Pergumulan (1978-1981)
3. Kyai Nyentrik Membela Pemerintah (Awal 1980-an)
4. Tuhan Tidak Perlu di Bela (Awal 1980-an)
5. Prisma Pemikiran Abdurrahman Wahid
6. Menguraikan Hubungan dan Negara
7. Islam, Negara, dan Pancasila (Aulia, Februari 1985: Artikel)
8. Pancasila dan Liberalisme (Kompas 30 Mei 1987: Artikel)
9. Agama, Ideologi dan Pembangunan (Prisma, 11 November 1980: Artikel)
10. Strategi Perjuangan Umat Islam (Media Indonesia, 3 Desember 1998: Artikel)

2. Pokok-pokok Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi

Demokrasi telah menjadi diskursus panjang yang melibatkan semua komponen masyarakat. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan

⁸⁰ Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 1-2.

maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Demokrasi yang diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan otoriter. Sebagaimana dalam pandangan Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah suatu proses, „maksudnya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna.⁸¹ Demokrasi sebagai proses mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkret dari prinsip demokrasi itulah yang menjadi ukuran penting, keadaan atau kondisi demokrasi bisa berubah-ubah, berkembang atau merosot tergantung dari imbalan kekuatan yang berlaku.

Bagi Abdurrahman Wahid, landasan demokrasi adalah keadilan kemandirian untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Intinya demokrasi menuntut adanya keadilan dan mensyaratkan adanya otonomi setiap individu. Akan tetapi demokrasi tidak mengakui adanya kemutlakan, sebab pada dasarnya demokrasi merupakan proses tawar-menawar dan negosiasi secara terus-menerus. Dengan demikian demokrasi selalu menyisahkan hal-hal yang masih bisa dinegosiasikan. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa perjuangan

⁸¹ Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 5.

menegakkan demokrasi tidak bisa dilakukan sekali saja, tapi butuh waktu yang panjang dan kesabaran yang tinggi disamping itu juga keseriusan.⁸²

Selanjutnya Gus Dur menegaskan tentang demokrasi beliau mengatakan: “di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik dari pada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya” jika tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar dinegeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Karenanya, dari sekarang sebenarnya telah dituntut diri kita untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang ada di negeri ini. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa teribat dengan penderitaan-penderitaan rakyat dibawah.⁸³ Dengan kata lain bahwa haruslah menekankan kepentingan moralitas perjuangan yang berpihak pada rakyat bawah. Seperti halnya dengan kemerdekaan, demokrasi dalam artian yang sebenarnya, terlepas dari predikat apapun yang dilekatkannya, tidak akan datang begitu saja dengan sendirinya, ia harus dicapai dengan perjuangan.

Selanjutnya Gus Dur mengemukakan demokrasi sebagai berikut: demokrasi sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin oleh undang-undang, sebab menurutnya kebebasan berpendapat

⁸² *Ibid*, h. 6.

⁸³ *Ibid*, h. 93.

merupakan salah satu esensi demokrasi.⁸⁴ Yang tak kalah pentingnya, masyarakat dituntut juga untuk siap berdemokrasi. Dalam pandangan Gus Dur, demokrasi adalah sebagai suatu proses, artinya, demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna.⁸⁵

Gus Dur menegaskan kembali demokrasi juga menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara dimuka undang-undang, dengan tidak memandang asal usul etnis, budaya, agama, dan bahasa.⁸⁶ Oleh karena itu Gus Dur menegaskan serta menguraikan nilai-nilai demokrasi, menurutnya nilai demokrasi bukan hanya syura atau permusyawaratan saja, namun didalamnya ada nilai-nilai dasar yang lain seperti kebebasan, keadilan, dan syura itu sendiri.⁸⁷ Kebebasan itu artinya kebebasan individu didepan kekuasaan negara atau adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Sedangkan keadilan merupakan landasan dari demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai apa yang diinginkan dengan tidak mengganggu hak orang lain, sementara syura artinya bentuk cara kita memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan.

3. Islam dan Demokrasi di Indonesia Menurut Abdurrahman Wahid

⁸⁴ *Ibid*, h. 95.

⁸⁵ *Ibid*, h. 96.

⁸⁶ Abdul Ghofur, *Op. Cit*, h. 184.

⁸⁷ Abdul Ghofur, *Op. Cit*. h. 162.

Pengejawataan Islam dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, merupakan salah satu model bagaimana Islam berhubungan dengan negara. Dalam kasus Indonesia, negara yang demikian majemuk susunan warga negara dan situasi geografisnya telah menempatkan Islam bukan satu-satunya agama yang ada. Dengan kata lain negara harus memberikan layanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Negara pancasila dapat diterima umat Islam di karena Islam tidak mengenal konsep negara Islam dan sistem pemerintahan yang definitif. Menurut Gus Dur konsep negara Islam tidak dikenal dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan sistem alih kepemimpinan negara (suksesi) yang berbeda-beda. Konsep suksesi sebagai bagian penting dalam sistem negara seharusnya jelas dan definitif dan hal itu ternyata tidak dimiliki oleh Islam.⁸⁸

Pandangan yang menyebut Abdurrahman Wahid sebagai pejuang demokrasi rasanya tidak berlebihan bila menengok sepak terjang dan pemikirannya yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan penguatan akar civil society.⁸⁹ Apresiasi terhadap sekularisme dan liberalisme ini tidak membuat Abdurrahman Wahid takut untuk di cap sebagai muslim sekularisme dan liberalisme, bahkan beliau dengan tegas mengatakan bahwa nilai-nilai inti yang terkandung dalam demokrasi adalah nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, liberalisme merupakan satu-satunya ideologi yang dapat membimbing kearah kehidupan yang

⁸⁸ Ali Masykur Musa, *Op. Cit.* h. 103-104.

⁸⁹ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 180.

lebih demokratis, dan liberalisme sendiri menurutnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.⁹⁰

Sebagaimana kebanyakan cendekiawan Muslim Indonesia yang selalu melandaskan nilai-nilai demokrasi dalam ajaran Islam, maka demikian hanya Abdurrahman Wahid menyebut Islam sebagai agama demokrasi alasannya:

Pertama, Islam adalah agama hukum, yang berarti ajaran Islam berlaku bagi semua orang, baik menyangkut pemegang kekuasaan tertinggi maupun rakyat jelata dikenakan hukuman yang sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawara (syura), perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka melalui musyawara. Pembahasan musyawara, apakah nanti berujung pada voting atau tidak, itu tidak relevan. Hal terpenting menurutnya adalah tradisi membahas, mengajukan pemikiran secara bebas, dan diakhiri dengan kesepakatan, dan kesepakatan adalah musyawara. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan, karenanya kehidupan manusia itu tarafnya tidak boleh statis, tapi harus meningkat terus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan menurut Abdurrahman Wahid, merupakan prinsip dari demokrasi. mengingat demokrasi pada hakekatnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karenanya Islam juga sering disebut agama *islah* (rekonsiliasi). Dan

⁹⁰ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 183

keempat, sebagaimana demokrasi, Islam *das sollen* juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.⁹¹

Abdurrahman Wahid mengartikan demokrasi sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat, ke-*nyelene*-an benar-benar dijamin oleh undang-undang, sebab menurutnya, “*nyeleneh*” merupakan salah satu esensi demokrasi. Adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat, adanya kebebasan berpergian, masuk, dan keluar negeri tanpa harus dikaitkan dengan masalah politik. Orang yang mengkritik pemerintah sekeras apapun, menurut Abdurrahman Wahid bukan alasan bagi pemerintah untuk melakukan “*cekal*”. Cekal semestinya di peruntukan bagi mereka yang melakukan tindak kriminal, terlebih kriminal ekonomi. Berperannya kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kekuasaan. Adanya pemisahan secara tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi diantara tiga lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya, *pertama*, rasa tanggung jawab pada kepentingan bersama, *kedua*, kemampuan menilik masa depan, dan *ketiga*, kesediaan berkorban bagi masa depan. Dan itu semua menurut Abdurrahman Wahid, membutuhkan adanya kerelaan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa harus diberi imbalan. Nah “*kerelaan*” inilah sebenarnya hakekat dari demokrasi, jadi demokrasi adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rela.⁹²

⁹¹ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 184.

⁹² Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 185.

Demokrasi juga menuntut adanya kesanggupan untuk melihat bahwa secara keseluruhan (utuh), tanpa harus dipertentangkan, baik dari sisi buku, ideologi, ras, budaya, bahasa dan terlebih dalam hal agama. Bahwa perbedaan ideologi, ras, tingkat pendapatan ekonomi, agama, tidaklah berarti masyarakat berbeda pada prinsipnya, melainkan hanya pada penampilan fisik dan penampilannya. Dalam demokrasi juga ada kemauan untuk memberi dan menerima. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, selain masyarakat juga harus bisa memberikan tempat pada keyakinan yang bukan agama.

Dari pemahaman demokrasi ini, setidaknya ada tiga hal pokok yang concern pemikiran politik dari anak sulung K.H. A. Wahid Hasyim ini, *pertama*, pengembangan wawasan kebangsaan dengan entry point menolak segala bentuk eksklusifisme dan sektarianisme. *Kedua*, kegigihan dalam mengupayakan *civil society* yang berdaya. Dan *ketiga*, penghargaan terhadap pluralisme atau kemajemukan masyarakat Indonesia.⁹³

Sinyalemen Abdurrahman Wahid ini, semestinya bukan hanya di tangkap umat Islam saja, tetapi juga bagi umat-umat agama lainnya. Artinya ketika semua umat beragama sama-sama menginginkan terciptanya toleransi antar umat beragama, maka masing-masing agama tidak seharusnya menampilkan eksklusifitasnya, sebaliknya, yang mesti ditampilkan adalah sikap inklusifitasnya. Abdurrahman Wahid

⁹³ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 187.

menyadari sepenuhnya betapa sulitnya untuk memadukan antara demokrasi dan agama dalam konteks toleransi antar umat beragama, yang pada kenyataannya memang memiliki perbedaan-perbedaan yang relatif signifikan. Agama sebagaimana dimengerti Abdurrahman Wahid senantiasa bertitik tolak dari pandangan normatif yang diajarkan kita sucinya. Ini berarti hanya ada satu kebenaran yang dapat diterima oleh agama yaitu kebenaran ajarannya sendiri.⁹⁴

Di sinilah tampak terjadi tarik-menarik antara demokrasi sebagai salah satu keinginan bersama dan mempunyai nilai-nilai yang bersifat universal dengan agama yang berfungsi sebagai way of life. Padahal kita juga sepakat, tentu dengan keyakinan yang jujur, bahwa dalam masing-masing agama juga terkandung nilai-nilai demokrasi yang bisa mendorong terciptanya demokratisasi dalam masyarakat.

Keseriusan Abdurrahman Wahid juga tercermin dengan berdirinya Kelompok Kerja (Pokja) dan Forum Demokrasi (Fordem) bersama dengan tokoh-tokoh marjinal lainnya. Kelahiran Fordem menurut Gus Dur lebih merupakan perwujudan dari rasa keprihatinan atas munculnya berbagai isu sektarianisme dan primordialisme, yang gejalannya ditimbulkan akibat kurangnya kebebasan dan tidak adanya nilai-nilai demokrasi yang memadai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁵

⁹⁴ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 192.

⁹⁵ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit.* h. 198.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS DAN
ABDURRAHMAN WAHID TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI DI
INDONESIA

A. Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia

Islam merupakan agama Samawi yang diturunkan dari Allah SWT, melalui utusannya Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadist, sedangkan demokrasi adalah pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat. Mengenai prinsip-prinsip Islam dan demokrasi memiliki kesamaan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di bentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sedangkan Islam yang mutlak benar hanya milik Allah SWT semata.

Amien Rais dan Abdurrahman Wahid adalah intelektual Muslim kontemporer yang dalam pengembaraan intelektualnya cukup kritis terhadap kekuasaan, khususnya pada era Orde Baru. Kritisisme yang mereka bangun semata-mata untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih demokratis, meskipun keduanya secara umum tidak setuju dengan perubahan politik yang bersifat radikal dan revolusioner. Baik Amien Rais maupun Abdurrahman Wahid sikap dan pemikiran politiknya merupakan sintesis positif antar pemikiran sunni dan gagasan individualnya yang kritis dan berorientasi kepada kemashlahatan umum, sehingga dengan mudah dan sadar mereka menerima gagasan demokrasi modern secara terbuka. Bagi keduanya persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara

yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi.

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia

Meskipun Abdurrahman Wahid dan Amien Rais mempunyai perbedaan-perbedaan, bukan berarti keduanya tidak mempunyai celah-celah yang menunjukkan adanya persamaan. Ada beberapa hal yang menunjukkan adanya persamaan di antara keduanya. *Pertama*, karakteristik pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari'ah. Hanya saja Gus Dur lebih suka menjadikan syari'ah sebagai social ethics dan berfungsi komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syari'ah sebagai "ideologi alternatif". *Kedua*, Gus Dur dan Amien Rais sama-sama sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu hal yang final, dan menolak setiap upaya untuk menghadirkan negara Islam di Indonesia. Baik Gus Dur maupun Amien Rais bersepakat bahwa kehadiran negara Islam di Indonesia belum tentu membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, dan juga belum tentu menjamin tetap utuhnya integrasi nasional bangsa Indonesia. *Ketiga*, Gus Dur dan Amien Rais Sepakat bahwa tidak ada didalam Al-Qur'an maupun Hadist yang mengatur konsep tentang negara yang ada hanyalah nilai-nilai yang bersifat abadi, dan dari nilai-nilai itu ada yang terkandung dengan nilai-nilai demokrasi.

Perbedaan paradigma pemikiran Amien Rais dan Abdurrahman Wahid dalam konteks tertentu mempunyai implikasi yang berbeda, khususnya dalam

merumuskan hubungan Islam (syari'ah) dan demokrasi. Meskipun sama-sama menolak syari'ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimannya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi syari'ah dari penyelewengan atau distorsi dan detereorisasi. Sedangkan Abdurrahman Wahid mendukung demokrasi liberal justru lebih sebagai sebuah keharusan untuk melindungi pluralisme masyarakat bangsa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Islam dan demokrasi menurut M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid bagi keduanya persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi.
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, persamaannya yaitu karakteristik pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari'ah. Hanya saja Gus Dur lebih suka menjadikan syari'ah sebagai social ethics dan berfungsi komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syari'ah sebagai "ideologi alternatif". Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaan paradigma pemikiran Amien Rais dan Abdurrahman Wahid dalam konteks tertentu mempunyai implikasi yang berbeda, khususnya dalam merumuskan hubungan Islam (syari'ah) dan demokrasi. Meskipun sama-sama menolak syari'ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimannya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi syari'ah dari penyelewengan atau distorsi dan detereorisasi. Sedangkan

Abdurrahman Wahid mendukung demokrasi liberal justru lebih sebagai sebuah keharusan untuk melindungi pluralisme masyarakat bangsa.

B. Saran

Pemerintah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks politik Islam di Indonesia. *Pertama*, bagi para kaum akademik mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam terutama di Indonesia, yang lebih terkait lagi dengan *fiqh siyasah*. Mudah-mudahan percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya kajian *siyasah* yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakkan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, kajian tentang politik Islam akan semakin menemukan bentuknya.

Dan terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini sangat kurang sempurna. Namun dari kekurangan sempurnaan tersebut, justru diharapkan akan dapat ditemukan arus lain dari kajian ini, oleh peneliti lain yang akan mengkaji pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- A'laal-Maududi Abdul. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Al-Brebesy Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Anatomi. "Studi Kepustakaan". (On-Line). Tersedia di:
<https://kbbi.web.id/anatomi>. (2009).
- Arief Eddy Rudiana. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Aziz Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Azra Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Fh UII Press, 2003.
- Barton Greg. *Biografi Gusdur. The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS, 1977.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjema.*, Surakarta: Al-Karim, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Edisi ke 4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghofur Abdul. *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Joko Suvbagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset dan Sosial*. (Cet ke IV). Bandung: Maju Mundur, 1990.

- Mariam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008.
- Masdar Amarudin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Masykur Musa Ali. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- MD. Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Muhammad, Najib dan Sukardiyono, Kwat. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Muhamudunnasir Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Musa Ali Masykur. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- M. Karim Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- M. Rais Amien. *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Nurtjahjo Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Pulungan Sayuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rais Amien. *Membangun Politik Adiluhung*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Rais Amien. *Tauhid Sosial*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rosyada Dede, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Salim, Peter dan Salim, Yeni. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. Malang: UMM Pres, 2002.
- Syam Firdaus. *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Syam Firdaus. *Di Pentas Politik Indonesia Modern*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.